



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 027/Kep.329-BKAD/2022
TENTANG
STANDARISASI HARGA TERTINGGI SATUAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1147-BPKA/2021 namun dalam perkembangannya terdapat usulan dari Perangkat Daerah tentang perubahan komponen pada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pergeseran Tahun 2022 sehingga terjadi penambahan komponen dan perubahan Satuan Harga Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 984 Tahun 2017 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 57);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 014 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 02);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Ketentuan Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai penentuan harga atau nilai tertinggi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Nilai atau harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sudah termasuk keuntungan dan biaya *overhead*.
- KELIMA : Nilai atau harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen), terkecuali alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 027/Kep.1147-BPKA/2021 tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021 masih tetap berlaku, dengan perubahan penambahan komponen jenis dan harga satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 April 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 00

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

**STANDAR SATUAN HARGA (SSH)
 PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

| KODE | NAMA BARANG | SPEKIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN | KODE REKENING |
|-------------------|--|---|--------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ASET | | | | |
| 1.1 | ASET LANCAR | | | | |
| 1.1.12 | Persediaan | | | | |
| 1.1.12.01 | Barang Pakai Habis | | | | |
| 1.1.12.01.01 | Bahan | | | | |
| 1.1.12.01.01.0001 | Bahan Bangunan dan Konstruksi | | | | |
| 1.1.12.01.01.0001 | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hias Maung Bandung 2 Cabang 3 | Tiang Lampu Mb2 cabang 3 | Unit | 23,577,100 | 5.2.02.18.01.0003 |
| 1.1.12.01.01.0001 | Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Hias Maung Bandung 2 Cabang 4 | Tiang Lampu Mb2 cabang 4 | Unit | 25,552,100 | 5.2.02.18.01.0003 |
| 1.1.12.01.01.0012 | Bahan Lainnya | | | | |
| 1.1.12.01.01.0012 | REAGEN HIV/SIFILIS DUO | "Product Name Reagen HIV/Syphilis Duo Jenis Produk Sesuai Izin Edar Multiple autoantibodies immunological test system Fungsi Mendeteksi antibodi HIV tipe 1 dan 2. Mendeteksi antibodi Treponema palidum Spesifikasi Produk Secara Singkat Tes kualitati | Kit | 17,564 | 5.1.02.01.01.0012 |
| 1.1.12.01.03 | Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor | | | | |
| 1.1.12.01.03.0013 | Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | | | | |
| 1.1.12.01.03.0013 | DRY CLEAN | Jas Laboratorium Bahan Drill | Pcs | 47,100 | 5.1.02.02.01.0049 |
| 1.1.12.01.03.0013 | RH KLINIS | Alat Tes Psikologi - RH KLINIS | Rim | 650,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | BUKU IST | Alat Tes Psikologi - BUKU IST | Buku | 25,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | LJ IST | Alat Tes Psikologi - LJ IST | Rim | 375,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | LJ FRT | Alat Tes Psikologi - LJ FRT | Rim | 225,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | KOTAK WISC | Alat Tes Psikologi - KOTAK WISC | Kotak | 1,200,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | KARTU CAT | Alat Tes Psikologi - KARTU CAT | Buah | 4,750,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | MANUAL WBIS | Alat Tes Psikologi - MANUAL WBIS | Buku | 20,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | PROTOKOL WBIS | Alat Tes Psikologi - PROTOKOL WBIS | Rim | 675,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | MANUAL WISC | Alat Tes Psikologi - MANUAL WISC | Buku | 20,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | PROTOKOL WISC | Alat Tes Psikologi - PROTOKOL WISC | Rim | 675,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | KOTAK SB | Alat Tes Psikologi - KOTAK SB | Kotak | 1,950,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | MANUAL SB | Alat Tes Psikologi - MANUAL SB | Buku | 24,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | PROTOKOL SB | Alat Tes Psikologi - PROTOKOL SB | Set | 20,000 | 5.1.02.01.01.0036 |
| 1.1.12.01.03.0013 | LJ FORER | Alat Tes Psikologi - LJ FORER | Rim | 475,000 | 5.1.02.01.01.0036 |

| KODE | NAMA BARANG | SPESIFIKASI | SATUAN | HARGA SATUAN | KODE REKENING |
|-------------------|--|--|--------|--------------|-------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.02.18.01.0003 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | | | | |
| 1.3.02.18.01.0003 | Pengadaan dan Pemasangan Papan Nama Jalan | Pengadaan dan Pemasangan Papan nama jalan | Unit | 1,050,000 | 5.2.02.18.01.0002 |
| 1.3.02.18.01.0003 | Pengadaan Daun Papan Nama Jalan | Pengadaan Daun Papan Nama Jalan | Buah | 234,000 | 5.2.02.18.01.0002 |
| 1.3.02.18.01.0003 | Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 60 Cm | Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 60 Cm | Buah | 1,796,000 | 5.2.02.18.01.0003 |
| 1.3.02.18.02 | Rambu-rambu Lalu Lintas Udara | | | | |
| 1.3.02.18.02.0007 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya | | | | |
| 1.3.02.18.02.0007 | Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 80 Cm | Pengadaan Bahan Cermin Tikungan Ukuran 80 Cm | Buah | 2,750,000 | 5.2.02.18.01.0003 |
| 8 | BEBAN DAERAH | | | | |
| 8.1 | BEBAN OPERASI | | | | |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | | | | |
| 8.1.02.03 | Beban Pemeliharaan | | | | |
| 8.1.02.03.02 | Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | | | | |
| 8.1.02.03.02.0463 | Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan | | | | |
| 8.1.02.03.02.0463 | Biaya Workshop/Seminar/Diklat | Workshop/Seminar/Diklat yang dilakukan secara Virtual | Orang | 150,000 | 5.1.02.02.12.0001 |
| 8.1.02.03.02.0463 | Biaya Workshop/Seminar/Diklat/Daring | Workshop/Seminar/Diklat/Daring yang dilakukan secara virtual | Orang | 250,000 | 5.1.02.02.12.0001 |
| 8.1.02.03.02.0463 | Biaya Workshop/Seminar/Diklat | Workshop/Seminar/Diklat/Daring yang dilakukan secara virtual | Orang | 500,000 | 5.1.02.02.12.0001 |
| 8.1.02.03.02.0463 | Biaya Workshop/Seminar/Diklat | Workshop/Seminar/Diklat/Daring yang dilakukan secara virtual | Orang | 1,000,000 | 5.1.02.02.12.0001 |
| 8.1.02.03.04 | Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | | | |
| 8.1.02.03.04.0006 | Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Tol | | | | |
| 8.1.02.03.04.0006 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Tiang PJU | Bandung Caang Baranang Teguran Gubernur | Unit | 24,041,609 | 5.2.04.01.01.0004 |
| 8.1.02.03.04.0006 | Pengadaan dan Pemasangan Tiang Tiang PJL | Bandung Caang Baranang Teguran Gubernur | Unit | 3,471,632 | 5.2.04.01.01.0004 |

Pt. WALI KOTA BANDUNG
TTD.

YANA MULYANA

